

Pelatihan Analisis Kebijakan Bidang Kesehatan

Jusuf Irianto

Gitadi Tegas S.

Forum Kebijakan Kesehatan Indonesia III

Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga

Surabaya, 5 Juni 2012

Pokok Bahasan

I. Konsep Analisis Kebijakan (*Policy Analysis*)

- Definisi, Pengertian, Teori dan Masalah Kebijakan
- Ruang Lingkup Kebijakan
- Kebijakan di bidang Kesehatan sebagai Kebijakan Publik
- Konsep Analisis Kebijakan (*Policy Formulation, Policy Implementation, Policy Review*)

II. Review/Evaluasi Kebijakan (*Policy Review/Evaluation*)

- Ruang Lingkup Evaluasi Kebijakan
- Prinsip Evaluasi Kebijakan
- Pendekatan dalam Evaluasi Kebijakan
- Tahapan Evaluasi Kebijakan

III. Pengantar Penyusunan *Policy Brief*

I. Konsep Analisis Kebijakan (*Policy Analysis*)

1. Definisi, Pengertian, Teori dan Masalah Kebijakan
2. Ruang Lingkup Kebijakan
3. Kebijakan di bidang Kesehatan sebagai Kebijakan Publik
4. Konsep Analisis Kebijakan (*Policy Formulation, Policy Implementation, Policy Review*)

1. Definisi, Pengertian, Teori dan Masalah Kebijakan

- Kebijakan Publik
 - Thomas R. Dye
 - Anything to do or not to do.
 - William Dunn
 - Disiplin ilmu sosial terapan yg menggunakan berbagai metode, argumen, dan transformasi informasi yang relevan dalam suatu *setting* politik untuk memecahkan problem publik/kebijakan.

2. Ruang Lingkup Kebijakan Publik

- Ruang Lingkungan Kebijakan Publik mencakup Pelayanan Publik.
- Pelayanan Publik
 - Kegiatan/rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa, dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

1. Kebijakan di bidang Kesehatan sebagai Kebijakan Publik
2. Konsep Analisis Kebijakan (*Policy Formulation, Policy Implementation, Policy Review*)

→ Refer to: 2nd Slide

II. Review/Evaluasi Kebijakan (*Policy Review/Evaluation*)

1. Sekilas Tentang Evaluasi Kebijakan
2. Tujuan Evaluasi Kebijakan
3. Ruang Lingkup Evaluasi Kebijakan
4. Prinsip Evaluasi Kebijakan
5. Pendekatan dalam Evaluasi Kebijakan
6. Tahapan Evaluasi Kebijakan

1. Sekilas tentang Evaluasi Kebijakan

- Dilakukan guna menguji kemampuan suatu kebijakan dalam mengatasi masalah.
- Dapat memberikan informasi tentang keberhasilan dan kegagalan sebuah kebijakan.
- Dari tahap ini akan dapat ditentukan masa depan (prospek) suatu kebijakan.

2. Tujuan Evaluasi Kebijakan

- Penilaian efektifitas pencapaian tujuan sebuah kebijakan publik untuk kemudian dipertanggungjawabkan pada konstituen.
- Penilaian “manfaat” suatu kebijakan.
- Pengidentifikasian penyebab kegagalan atau dampak suatu kebijakan publik yang telah dilaksanakan.

3. Ruang Lingkup Evaluasi Kebijakan

- Penilaian atau pengukuran kebijakan termasuk isi, implementasi dan dampaknya.
- Penilaian keberhasilan program, teknik pengukuran serta metode analisis yang digunakan.

4. Prinsip Evaluasi Kebijakan

- Berfokus pada nilai manfaat suatu kegiatan, program atau kebijakan;
- Interdependensi fakta nilai, evaluasi tidak hanya tergantung pada bukti tapi juga terhadap nilai;
- Berorientasai pada masa kini dan lalu;
- Obyektif.

5. Pendekatan dalam Review Kebijakan

- a. Evaluasi Semu (*Pseudo Evaluation*)
- b. Evaluasi Formal (*Formal Evaluation*)
- c. Evaluasi Keputusan Teoritis (*Decision Theoretic Evaluation*)

a. Evaluasi Semu (*Pseudo Evaluation*)

- Menggunakan metode deskriptif, menghasilkan informasi valid dan terpercaya mengenai hasil kebijakan tanpa berusaha menanyakan manfaat atau nilai bagi individu, kelompok, atau masyarakat.
- Asumsi: bahwa ukuran tentang manfaat atau nilai merupakan sesuatu yang dapat terbukti dengan sendirinya (*self evident*).
- Secara khusus menerapkan kombinasi metode (desain eksperimental-semu, kuesioner, random sampling, teknik setatistik) untuk menjelaskan variasi hasil kebijakan yang ada (misalnya: jumlah lulusan pelatihan yang dipekerjakan, Unit-unit pelayanan medis yang diberikan, keuntungan bersih yang dihasilkan) diterima begitu saja sebagai tujuan yang tepat.

b. Evaluasi Formal (*Formal Evaluation*)

- Menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi tentang hasil kebijakan atas dasar tujuan yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan dan administrator program.
- Asumsi: bahwa tujuan dan target diumumkan secara formal merupakan ukuran yang tepat untuk manfaat atau nilai kebijakan program.
- Menggunakan undang-undang, dokumen program, dan wawancara dengan pembuat kebijakan dan administrator untuk mengidentifikasi, mendefinisikan dan menspesialisasikan tujuan dan target kebijakan.
- Kriteria evaluatif yang sering digunakan adalah efektifitas dan efisiensi.
- *Evaluasi sumatif* : memantau pencapaian tujuan dan target formal setelah suatu kebijakan atau program diterapkan untuk jangka waktu tertentu.
- *Evaluasi formatif* : meliputi usaha-usaha untuk secara terus menerus memantau, pencapaian tujuan-tujuan dan target formal.

c. Evaluasi Keputusan Teoritis (*Decision Theoretic Evaluation*)

- Menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi mengenai hasil kebijakan yang secara eksplisit dinilai oleh berbagai macam pelaku kebijakan.
- Asumsi: bahwa tujuan dan target para pembuat kebijakan dan administrator merupakan salah satu sumber nilai, karena semua pihak yang mempunyai andil dalam formulasi dan implementasi kebijakan (staf tingkat menengah dan bawahan, pegawai pada badan-badan lainya, kelompok klien) dilibatkan dalam merumuskan tujuan dan target sebagai acuan dalam pengukuran kinerja.

6. Tahapan Evaluasi Kebijakan

- TAHAP 1: MERUMUSKAN MASALAH
- TAHAP 2: PENENTUAN KRITERIA EVALUASI
- TAHAP 3: IDENTIFIKASI ALTERNATIF KEBIJAKAN
- TAHAP 4: EVALUASI ALTERNATIF KEBIJAKAN
- TAHAP 5: PENUNJUKAN DAN PEMILIHAN BERBAGAI ALTERNATIF
- TAHAP 6: MONITORING DAN EVALUASI KELUARAN KEBIJAKAN

III. Pengantar Penyusunan *Policy Brief*

- Pengertian PB:
 - Pernyataan ilmiah yang sifatnya singkat (*short*), *neutral summary* tentang sesuatu isu atau masalah tertentu.
- PB biasanya digunakan oleh pemerintah dan dunia industri.
- Konten PB meliputi masalah publik yang telah mempengaruhi atau dipengaruhi pemerintah.

Komponen *Policy Brief*

1. Executive Summary
2. Statement of the Issue/Problem
3. Background (of the problem)
4. Statement of your organization's interests in the issue
5. Pre-existing Policies
6. Policy Options
7. Advantages and Disadvantages of Each Policy Options
8. Your Recommendation
9. Sources Consulted or Recommended
10. Lampiran

1. Executive Summary

- Kira-kira terdiri dari 150 kata
- Fokus pada tujuan dibuatnya PB dan rekomendasinya.
- Letak: menonjol (bahkan boleh di bagian kover).
- Dimaksudkan untuk menarik perhatian kalangan tertentu (pengambil keputusan, politisi/legislator, lembaga internasional, LSM, dan lain-lain).

2. Statement of the Issue/Problem

- Ditindaklanjuti dengan rumusan masalah dalam bentuk kalimat tanya (*a research question*).
- Kata tanya yang umumnya dipakai: Apa, Haruskah (Should, How should, Who should, When should).
- Hakikat PB adalah menjawab rumusan masalah.

3. Background (of the problem)

- Ilustrasi berfokus pada penyajian data empiris.
- Pernyataan tentang adanya masalah tertentu (Perbandingan *das sollen* dengan *das sein*)
- The most important statement: fakta esensial yang “perlu diketahui” oleh pengambil keputusan sebagai sasaran PB agar konteks masalah mudah dan cepat dipahami.
- Sifat: *clear, precise, & succinct.*

4. Statement of your organization's interests in the issue

- Dimaksudkan untuk mengingatkan pembaca tentang alasan masalah menjadi penting baik bagi negara, kelompok, maupun organisasi dan memerlukan *advise*.
- Contoh: pencapaian target-target MDG's di bidang kesehatan dan permasalahannya dikaitkan dengan kelompok atau organisasi kesehatan.

5. Pre-existing Policies

- Menyajikan informasi tentang semua instrumen (kebijakan) yang telah dibuat untuk mengatasi masalah.
- Hasil/efektivitas kebijakan yang telah diperoleh selama ini dalam mengatasi masalah.
- Tegaskan kembali bahwa diperlukan instrumen alternatif yang diasumsikan lebih efektif dalam mengatasi masalah yang sama.

6. Policy Options

- Mengembangkan *possible courses of action or inaction* yang diperlukan.
- Sajikan dan yakinkan pembaca dengan setidaknya 3 (tiga) *potential courses of action*.
- Uraikan (deskripsi) dengan rinci masing-masing alternatif dengan bahasa yang lugas dan istilah yang mudah dipahami.

7. Advantages and Disadvantages of Each Policy Options

- Sajikan informasi tentang keuntungan (manfaat) dan kelemahan masing-masing alternatif,.
- Pernyataan selalu dikaitkan dengan perspektif entitas yang diwakili oleh penyusun PB.
- Sajikan dengan pola “pro” dan “kontra”.

8. Your Recommendation

- Setelah diperhitungkan keuntungan dan kelemahan masing-masing alternatif, pastikan bahwa hanya ada satu alternatif yang terbaik sebagai rekomendasi PB.
- Dapat ditambahkan syarat atau prasyarat yang diperlukan untuk memperkuat implementasi kebijakan yang direkomendasikan.

9. Sources Consulted or Recommended

- Menyajikan sumber-sumber yang telah diperoleh dan dirujuk dalam PB.
- Sebaiknya masing-masing sumber tersebut diberi satu hingga tiga kalimat yang menegaskan kelebihan masing-masing sumber tersebut.
- Berguna bagi pembaca PB yang ingin memperdalam masalah yang telah dibahas dalam PB.

10. Lampiran

- Menyajikan semua bahan dari berbagai sumber yang layak untuk dilampirkan dalam PB.
- Ukuran ketebalan lampiran relatif, lazim/pantas.
- Relevan dengan masalah yang dibahas PB.

TERIMA KASIH

